

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah titik awal untuk setiap informasi yang dibutuhkan pengguna untuk memahami keputusan mereka, apakah itu pekerjaan keuangan aktual atau hipotesis yang dipegang oleh bisnis atau entitas lain di masa lalu. Ketika mengevaluasi transaksi keuangan, pemerintah harus melakukannya secara transparan dan akuntabel. Kemampuan untuk menilai dan menyesuaikan perjanjian pinjaman diperlukan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan audit yang disebut dengan audit diperlukan adanya pihak ketiga yang dapat dipercaya dan tidak memihak atau disebut juga dengan auditor. Ketika meninjau catatan keuangan, auditor akan memberikan saran tentang bagaimana menginterpretasikan setiap catatan keuangan yang telah direview. Hasil pemeriksaan yang dilakukan berfungsi untuk membantu organisasi pengguna mengartikulasikan keprihatinannya. Menurut Standar Nasional Pemeriksaan Keuangan (SPKN) tertentu ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, menurut UU No. 15 Tahun 2006. Menurut Pasal 23E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia edisi 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah badan pemerintah yang ditunjuk untuk mengawasi dan mengawasi kegiatan keuangan pemerintah. BPK memiliki sarana dan kemauan untuk menegakkan pemerintah yang efektif dan meningkatkan akuntabilitas (Undang-Undang RI, 2006).

Beberapa organisasi menginginkan agar pendirian Badan Pemeriksa Keuangan dan audit dilakukan untuk membuat catatan keuangan yang jujur dan jelas. Beberapa organisasi percaya pada BPK sebagai dokumen keuangan yang telah melalui audit kecurangan. Namun, meskipun kesimpulan audit berhasil, masih ada masalah tertentu dengan kebijakan moneter negara dan kerangka peraturan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2021, perdagangan valuta asing saat ini sangat fluktuatif. Hal ini berarti bahwa auditor harus meningkatkan kualitas audit mereka agar mereka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasilnya. Laporan informasi keuangan pemerintah. Lembaga dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memeriksa laporan keuangan harus mengetahui dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pemeriksaannya (BPK RI). Kepercayaan masyarakat atau pengguna terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap transaksi keuangan yang diaudit tidak sejalan dengan kualitas hasil audit. Semakin menguntungkan temuan audit keuangan, semakin percaya masyarakat dan pengguna terhadap BPK. Untuk memenuhi standar kualitas audit, auditor harus dapat mengidentifikasi dan melaporkan setiap masalah yang muncul selama proses pemeriksaan (Risky Fitri Septriana, 2021:23).

Di negara Indonesia pertanyaan tentang kualitas audit masih dilontarkan sehubungan dengan kasus-kasus pengadilan baru-baru ini yang salah menyebutkan nama auditor. Mirip dengan studi kasus "Audit BPK soal kerugiaan bantuan likuiditas

bank indonesia, yang tidak independen” yang dituliskan oleh Otto Hasibuan dan kuasa hukum Sjamsul Nurasalim. Beliau banyak mengatakan BPK tidak independen dalam kasus tersebut. Lantaran melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan dari KPK yang berkemampuan mengidentifikasi suatu perkara. Karena peristiwa inilah Otto H. di Tangerang melaporkan BPK dan Auditor BPK Nyoman Wara sebagai pihak yang berkepentingan dalam hal ini. Otto Hasibuan menegaskan, dalam pelaksanaan audit hanya digunakan dokumen resmi atau keterangan dari pejabat KPK yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit. Membenarkan kebenaran Otto mengklaim saat itu KPK masih mengusut kasus korupsi SKL bantuan likuiditas bank indonesia, dengan bantuan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung. Syafaruddin saat itu telah dipenggal oleh Mahkamah Agung. Pandangan Otto, perkara tersebut telah diselesaikan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan pasal 10 peraturan bpk yang menyatakan bahwa BPK bertanggung jawab untuk menegakkan kedaulatan negara. Hal ini juga terungkap dari Standar Pemeriksaan Rekening Bank Asing pada Auditor Independen (Liputan6, 2019).

Rizal Djalil, anggota BPK, akhirnya dihadapkan pada kasus lain terkait SPAM suap proyek. Tidak ada auditor independen yang hadir dalam situasi tersebut untuk menyelesaikan tugas seseorang. Saat itu, Rizal telah menerima kurang lebih 100.000 dolar Singapura sekitar 1,3 juta dolar Singapura dari hasil penyelidikannya terhadap proyek SPAM, dan ia juga telah mengurangi barang bawaannya dari 18 juta menjadi 4,2 juta. Sebelumnya ada sejumlah Rizal dan Leonardo kemudian muncul sebagai tersangka baru setelah mereka diberhentikan dari proyek SPAM (Kompas.com, 2019).

Kualitas audit bukan satu-satunya hal yang dipertanyakan; kasus seperti " Audit RS Batua Kinerja BPK Tertunda ", yang sejak itu diganti namanya menjadi BPK, adalah salah satu contohnya, kemudian akan menarik perhatian dan menimbulkan pertanyaan tentang kualitas audit. BPK RI telah disarankan untuk menunggu hingga akhir tahun 2020 sebelum menerapkan undang-undang apa pun dalam kasus yang muncul sejak itu, menurut kepala Sulawesi Anggareksa, Wakil Ketua Komite Pekerja Menentang Korupsi (ACC). Akhir-akhir ini, Anggareksa kembali menekankan bahwa BPK RI harus memiliki staf profesional. Dia mungkin sampai pada kesimpulan bahwa KPK akan menjadi satu-satunya pihak yang akan menangani kasus jika BPK tidak dapat menilai kembali atau menyampaikan hasil auditnya segera Menurut (Sindonews.com, 2021). mengingkari pernyataan jelas Anggareksa yang menekankan pentingnya kinerja BPK yang profesional di tempat kerja, seolah-olah BPK yang mengumumkan kasus RS Batua tidak memiliki keahlian apa pun. Kualitas audit yang dilakukan oleh Provinsi Kepulauan Riau belum jelas dan tidak memiliki masalah. Apa yang terjadi di sini? Untuk membantu organisasi, auditor harus selalu memiliki kredensial yang valid saat melakukan audit. Ketika berbicara tentang hasil audit sebuah firma akuntan atas transaksi bisnis tertentu, justru pihak-pihak membutuhkan hasil audit karena lambat dihasilkan. Tuduhan korupsi yang melibatkan proyek Tugu Bahasa dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahun 2019 di ESDM Provinsi Kepri telah menimbulkan kekhawatiran terus-menerus tentang keadaan auditor Kepri. Dalam hal ini penyidikan Kepri Tanjung Pinang telah berlangsung beberapa

lama, namaun belum dapat mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana korupsi tersebut karena hasil pemeriksaan dari BPK dan BPKP Kepri masih belum diterima (Presmedia, 2019: 23).

Untuk menilai kualitas audit, auditor harus dapat dipercaya dan transparan sepanjang proses audit (SPKN, 2017). Untuk memastikan keandalan dan transparansi proses audit, auditor harus mempublikasikan hasil audit di berbagai media sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Standar Pemeriksaan Keuangan Dalam Negara (SPKN) tentang auditor independen, seorang auditor tidak dapat diintimidasi oleh klien berulang. Kemudian seorang auditor harus menjauhi jalan pintas mental dan tekanan dari luar karena yang ditekankan oleh auditor adalah informasi publik dari pada informasi privat. Meskipun SPKN telah berbicara tentang independensi ini setidaknya ada satu contoh auditor yang tidak benar-benar independen dalam pekerjaannya di proyek ini.

Seiring dengan integritas dan akuntabilitas yang diharapkan dimiliki oleh auditor, pengalaman kerja merupakan persyaratan lainnya. Dalam hal ini auditor harus Badan Pemeriksa Keuanagan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun Pada tahun 2006, BPK hanya perlu memahami tujuan. Oleh karena itu, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Bidang Keuangan (SPKN) 2017, diperlukan pengetahuan, karakter, dan keterampilan.

Berdasarkan kasus-kasus diatas, terlihat jelas bahwa BPK semakin kehilangan kepercayaan publik terhadap kualifikasi auditornya. Persepsi masyarakat terhadap kualitas audit yang bersangkutan dapat dilihat dan diukur bagaikan akuntabilitas auditornya. Sebagaimana terbukti dari kasus tertentu, ketergantungan auditor telah dikompromikan sebagai akibat dari persyaratan publikasi hasil audit. Hal ini berdampak negatif pada kualitas audit. Selain itu, kualitas audit dapat dilihat dari sudut pandang auditor independen yang sering dipertanyakan setelah tuduhan terkait penamaan. Tidak ada auditor independen yang dapat meningkatkan kualitas audit karena begitu auditor menerima pembayaran, hasil audit tidak lagi didasarkan pada fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Situasi ini telah membangun kepercayaan publik terhadap auditor yang tepat sasaran yang memeriksa keuanagan pemerintah, seperti yang dilakukan BPK.

Dalam penelitian ini juga didukung oleh peneliti yang dilakukan oleh (Andi Hardianti¹, Alimuddin, Syamsuddin, 2022:799) dengan judul “*The Effect Of Work Experience, Integrity, and Competence Of Auditors On Audit Quality With Emotional Intelligence As A Moderating Variabel*”. Terkait Audit Mutu. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja audit, independensi, dan akuntabilitas sangat memengaruhi kualitas audit. Untuk karyawan, terlepas dari keadaannya, dampak audit terhadap kualitas tidak disebutkan.

Penelitian sedang dilakukan, (Yuhanis Ladewi, dkk, 2022:10) judul "*Factors Affecting the Quality of Audit*". Mengatakan bahwa pengalaman kerja, akuntabilitas dan integritas berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan objektivitas dan perilaku tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Dalam penelitian ini juga didukung oleh peneliti yang dilakukan oleh (Krismadani, 2022:68) dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Integritas, Objektivitas, dan Pengalaman Terkait Kualitas Audit”. Terkait Audit Mutu. Penelitian ini menunjukkan bahwa standar audit, independensi, dan akuntabilitas sangat memengaruhi kualitas audit. Untuk karyawan, terlepas dari keadaannya, dampak audit terhadap kualitas tidak disebutkan. Penelitian sedang dilakukan, (Pratiwi, 2020:329) “Menurut " Peran Auditor yang Independen, Pendidikan Waktu, Kompleksitas Tugas, dan Persepsi Kualitas Audit ", independensi dan independensi auditor memengaruhi kualitas audit secara signifikan, sementara waktu pentangan dan tugas tugas tidak memiliki dampak yang sama.

Peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul yang telah ditentukan berdasarkan temuan atau masalah yang secara khusus terkait dengan kualitas audit dan yang telah ditemukan dalam penelitian sebelumnya.

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau”.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut, khususnya:

1. Proses audit diperlambat oleh auditor sehingga menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kualitas audit.
2. Badan Pemeriksa Keuangan mengidentifikasi pelanggaran sebagai kasus suap.
3. Kadang-kadang terjadi masalah audit yang tidak sesuai dengan rencana yang mengakibatkan kualitas audit tidak sesuai standar.

1.3 Batasan Masalah

Karena kurangnya waktu, sumber daya, dan sumber daya yang memadai di wilayah studi, masalah dengan penelitian ini ditemui. Masalah-masalah berikut yang ditangani oleh penulis:

1. Sasaran dalam pemeriksaan Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Kepri terletak di sini.
2. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti adalah pengalaman kerja auditor, akuntabilitas, dan integritas. Variabel dependen selanjutnya adalah kualitas audit.

1.4 Rumusan Masalah

Secara keseluruhan, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya:

1. Apakah kualitas audit sangat dipengaruhi oleh pengalaman kerja auditor sebelumnya?
2. Apakah ada hubungan yang signifikan antara kualitas audit dan akuntabilitas secara persial?
3. Apakah integritas secara persial memengaruhi kualitas audit secara signifikan?
4. Apakah akuntabilitas, integritas, dan pengalaman kerja auditor secara bersamaan memengaruhi kualitas audit?

1.5 Tujuan Penelitian

Sebagai contoh, tujuan penelitian ini dapat dipahami sebagai berikut:

1. untuk menilai dan memahami dampak uraian tugas auditor terhadap kualitas audit.
2. Untuk menganalisis dan memahami dampak akuntabilitas terhadap kualitas audit.
3. Untuk menganalisis dan memahami dampak integritas terhadap kualitas audit.
4. Untuk menganalisis dan memahami dampak pengalaman kerja, integritas, dan ketergantungan auditor terhadap kualitas audit pada saat yang sama.

1.6 Manfaat Teoritis

Dapat diasumsikan bahwa hasil penelitian ini akan memiliki manfaat akademik, teoritis, dan praktis. Berikut adalah beberapa keuntungan yang ditawarkan oleh para peneliti:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Akademik

Manfaat teoritis atau akademik, misalnya bisa dapat menabuh ilmu pengetahuan akan pengaruh pengalaman kerja auditor, tekanan anggaran waktu, dan integritas terhadap kualitas audit.

2. Masyarakat

Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan atau memperluas pengetahuan tentang audit keuangan pemerintah yang dipublikasikan untuk umum oleh kantor perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. Peneliti Selanjutnya

Selain itu, penelitian ini dapat diharapkan dapat digunakan sebagai referensi, input, dan perbandingan dan bisa dapat mendorong dilakukannya penelitian di bidang yang sama pada masa yang akan datang dan berikutnya.

1.6.2 Manfaat Ppraktis

1. Peneliti

- a. Peneliti dapat mengidentifikasi dan memahami bagaimana pengalaman kerja auditor, tekanan anggaran waktu, dan integritas mempengaruhi kualitas audit.
- b. Peneliti dapat menambah pengetahuan yang telah mereka peroleh selama proses penelitian.

2. University of Batam

- a. Untuk digunakan sebagai sumber penelitian atau peningkatan pengetahuan tentang akuntansi.
- b. Mungkin digunakan sebagai referensi untuk buku teks Universitas Putera Batam.